

NILAI-NILAI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM

Abdul Latif

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorongtalo
abdullatif1003@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to build a set of objectively verifiable and economic order based on the principle states that noble equality and justice to give birth to the civil society under the protection of Allah. The emergence of Islamic economics is intended to form the framework of the underlying economic growth in order to maintain a harmonious life safety and humane, based on the sources of religious values. Islam emphasizes the principle that every human activity measured by merit and sin, each of which is rewarding necessarily contain the value of worship, while the worship of man in economic activity can be characterized by its ability to do good deeds and fastabiqul khairat, enforce al-'adl (justice), which restricts people from do arbitrariness, both for themselves and their environment. Islamic economic characteristics include three basic principles. All three are fundamental and shared set of economic theory in Islam, namely the principle of belief, moral and legal principles (muamalah). Basic economic values of Islam consists of; ownership value, the value of fairness, balance value, the value of freedom, the value of togetherness. Principles and business ethics that is now becoming operational basis of Islamic financial institutions in Indonesia. In practical framework principles and business ethics are implemented in a variety of products and services services Shari'ah financial institutions that use the mechanism for the results (profit sharing).*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan rumuskanlah dan membangun sebuah tatanan ekonomi negara yang berakhlak mulia berazaskan persamaan dan keadilan untuk melahirkan masyarakat yang madani di bawah lindungan Allah. Munculnya ilmu ekonomi Islam dimaksudkan untuk membentuk pertumbuhan kerangka ekonomi yang mendasari pada upaya menjaga keselamatan hidup yang harmonis dan humanis, dilandasi oleh sumber-sumber nilai religi. Prinsip Islam menekankan bahwa setiap aktivitas manusia diukur dengan fahala dan dosa, setiap yang berfahala tentu mengandung nilai ibadah, sementara ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat ditandai dengan kesanggupannya berbuat ihsan dan fastabiqul khairat, menegakkan al-'adl (keadilan), dimana membatasi manusia dari berbuat kesewenangan, baik untuk diri dan lingkungannya. Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan. Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (profit sharing).*

Kata Kunci: Nilai Dasar, Membangun Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah yang bersifat praktis dan muncul setelah manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, memper-

tahankan dan menyambung hidup bagi diri sendiri dalam kehidupan pergaulan masyarakat dengan berbekal alam yang telah tersedia. Sementara aktivitas ekonomi telah ada sejak manusia mendiami bumi ini,

meskipun pengkajiannya secara ilmu baru dikenal sejak manusia mengenal peradaban.

Dasar ilmu ekonomi telah diletakkan landasannya oleh Adam Smith sejak tahun 1776, kemudian berkembang menjadi konsep hukum pasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Konsep hukum pasar terkenal dengan teorinya *“Bukan karena kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir atau tukang roti dapat makan, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Kita berbicara bukan karena rasa kemanusiaan, melainkan karena cinta mereka kepada mereka sendiri dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka”*.¹ Ilmu ekonomi kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis, memisahkan diri dari filsafat etika dan kepentingan dari nilai-nilai moral. Azas ekonomi kapitalis didasarkan pada *laissez faire* (bebas, liberal), sedangkan azas ekonomi sosialis didasarkan pada konsep pertentangan kelas. Arus kehidupan yang terbentuk akibat dari sistem ekonomi di atas, telah mengikis nilai-nilai gotong royong, musyawarah, tolong-menolong dan kebersamaan dalam bingkai religius, sehingga mengakibatkan lahirnya kemiskinan di tengah kemakmuran yang kondisi ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, bahkan sangat menyimpang dari garis panduan Islam.

Umat Islam telah melewati sejumlah masa/periode dalam kondisi metode berpikir produktif, mereka yang melemah hingga bahkan hilang. Namun demikian, alhamdulillah mereka telah berhasil melewati realitas ini sejak beberapatahun lalu. Tepatnya ketika munculnya dakwah Islam. Dakwah Islam ini telah berhasil mengarahkan kaum Muslim pada agama Islam yang mereka peluk sekaligus menjadikan mereka percaya pada pemikiran Islam dan hukum-hukumnya.

Jika kita mencoba menampilkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi kapitalisme, kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah sistem yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat

pemuasnya (*goods*). Ekonomi mereka sesungguhnya hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia.

Ekonomi kapitalis dibangun di atas tiga prinsip:²

1. Problem kelangkaan relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Maksudnya, barang-barang dan jasa-jasa yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus bermunculan dan beraneka ragam. Menurut mereka inilah problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Nilai (*value*) suatu barang yang diproduksi. Inilah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling banyak dikaji.
3. Harga (*price*) serta fungsi yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Harga adalah alat pendendali dalam sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:³

1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selamat tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Islam mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan

adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.

5. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya.
6. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
7. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
8. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ektasi, pornografi, klub malam, diskotik, dan sebagainya.

Salah satu tujuan *dinul Islam* adalah untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang berakhlak, egalitarian dan adil. Tujuan tersebut mencukup bagi semua aktivitas sosial juga tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, dirumuskanlah tujuan ekonomi Islam yaitu “untuk membangun sebuah tatanan ekonomi negara yang berakhlak mulia berazaskan persamaan dan keadilan untuk melahirkan masyarakat yang madani di bawah lindungan Allah.”⁴

Munculnya ilmu ekonomi Islam dimaksudkan untuk membentuk pertumbuhan kerangka ekonomi yang mendasari

pada upaya menjaga keselamatan hidup yang harmonis dan humanis, dilandasi oleh sumber-sumber nilai religi. Prinsip Islam menekankan bahwa setiap aktivitas manusia diukur dengan fahala dan dosa, setiap yang berfahala tentu mengandung nilai ibadah, sementara ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat ditandai dengan kesanggupannya berbuat *ihsan* dan *fastabiqul khairat*, menegakkan *al-‘adl* (keadilan), dimana membatasi manusia dari berbuat kesewenangan, baik untuk diri dan lingkungannya.

Selain itu, manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai jiwa raga dan sebagai makhluk sosial yang mempunyai bumi tempat berpijak, tentu dari segala keperluan hidupnya telah disediakan oleh Allah berupa benda-benda dalam berbagai bentuk. Manusia hidup memerlukan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak, jika sakit memerlukan obat, untuk meningkatkan taraf hidupnya tentu memerlukan pengetahuan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia memproduksi bahan-bahan sumber alam, kemudian hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi yang menjadi fokus dalam pembahasan ini diantaranya; 1) Aturan permainan ekonomi Islam, 2) Sistem ekonomi Islam, 3) Karakteristik ekonomi Islam, dan 4) Nilai-nilai dasar ekonomi Islam

II. PEMBAHASAN

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menimbulkan berbagai kesan yang beragam, bagi sebagian kalangan, kata Islam memposisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitraannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam

adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan, itu terletak pada pada sifat dan volumenya.⁵

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu.

Islamic economic is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁶

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷

Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in

relation to that problem from an islamic perspective. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.⁸

Dari definisi yang dikemukakan, dapat muncul suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif?. Ekonomi Islam jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan ini saling melengkapi dan bukan saling menafikan.

b. Aturan-Aturan Permainan Ekonomi Islam

Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah Swt, telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu, sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Uraian dibawah ini beberapa aturan "permainan" ekonomi Islam. Beberapa aturan itu di antaranya:⁹

1. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan

sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia, tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakannya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan (*khilafah*) dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah ini.

2. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu-individu lainnya. Dia telah menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap manusia; penampilan (perilaku) mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial merupakan kewajiban manusia terhadap umat muslim.
3. Semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah maka dia semakin dicintainya. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, individu ini pada akhirnya bertanggungjawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja sama dan melakukan kerja kolektif.
4. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun itu tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta ini. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam

kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan kemampuannya yang berbeda-beda sehingga mereka secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian ini tidak berarti (bahwa Islam) memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjanya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya kadang-kadang saja bahwa pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan (pada saat lain) menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik dan mantan majikan bisa menjadi majikan, dan sebagainya. Hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

5. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan, baik berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja, di pihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi dibedakan dengan kekuatan sosiopolitik, antara lain, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rincian-rincian ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena dilestarikannya

metode-metode yang digunakan oleh umat muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya.

6. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern, orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al-Qur'an mengemukakan kepada nabi dengan mengatakan: "... katakanlah (Muhammad kepada umat muslim): bekerjalah." Nabi juga telah meriwayatkan melarang mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja dengan baik dipuji dan Nabi SAW. diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Monastisisme dan asketisisme dilarang, Nabi SAW. diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Nabi Saw. pernah memohon kepada Allah Swt. untuk melindungi diri agar beliau tidak terjangkit penyakit lemah dan malas.
7. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan sendiri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Nabi Saw. diceritakan pernah menyuruh seorang penggali liang kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang bila dia melakukan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik."
8. Jangan membikin mudarat (kesulitan) dan jangan ada mudarat" adalah frasa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Saw. frasa ini berarti " mudarat yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti, dan juga yang dilakukan sekadar untuk melukai. Fakta mengenai mudarat yang menyakitkan seseorang perlu mendapatkan perhatian, baik yang disengaja oleh pelakunya untuk maksud tersebut maupun yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Mudarat harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatarbelaknginya. Namun kita harus cukup realistis dalam mengamati bahwa menghilangkan "mudarat" sama sekali dari kehidupan manusia adalah tidak mungkin. Mudarat itu sendiri selalu tidak diharapkan. Namun bila hal itu merupakan syarat yang tidak dapat dielakkan adanya, maka ia bisa dibenarkan.
9. Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Pelaksanaan kebaikan ini diawasi oleh lembaga-lembaga sosial yang pada akhirnya mewajibkannya dengan kekuatan hukum. Menurut Islam tidak cukup bila hanya memercayakan kepada niat baik seseorang untuk melakukan, katakanlah, perbuatan-perbuatan santun (memberi sedekah). Sebaliknya, sebagian besar dari apa yang disebut santunan sukarela dalam masyarakat non muslim harus didukung oleh hukum dalam masyarakat Muslim. Setiap Muslim dihimbau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh. Mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya, oleh Islam dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

Mekanisme pasar dalam masyarakat muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistis. Memang Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara para

penawar dan peminta, tetapi ia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut, dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerja sama. Namun dalam praktiknya, adanya akumulasi dan atau konsentrasi harta itu bisa mengundang campur tangan pemerintah. Campur tangan ini bisa berbentuk pengambilalihan produksi yang dimonopoli (oleh perorangan atau perusahaan tertentu) atau pengawasan dan penetapan harga oleh pemerintah.

Yang ketiga dan terakhir adalah mengenai teori nilai. Dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonomisnya. Dengan perkataan lain, semua yang dilarang digunakan otomatis tidak memiliki nilai ekonomis. Tentu saja karena minuman keras tidak bernilai sama sekali dalam masyarakat muslim, maka semua penawaran yang ada harus dianggap tidak ada dan setiap usaha untuk memproduksi dan mendistribusikannya sama sekali dianggap sebagai pemborosan dalam pengertian ekonomi.¹⁰

c. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling memengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sufah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah

dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna.¹¹

Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.¹²

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Disebut *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹³

Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya). Melalui aktifitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main.¹⁴

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keyakinan demikian akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral

yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Nilai-nilai keimanan ini yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.¹⁵

Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting, dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.

d. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang diringkas sebagai berikut:¹⁶

1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan

Allah), firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 284, yang artinya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. al-Maai'dah ayat 17, yang artinya:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. al-Hadiid ayat 7, yang artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya¹⁷. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Selain itu terdapat sabda Rasulullah Saw, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabdanya "*Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia itu.*"

Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa semua harta ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

Firman Allah SWT dalam Surat an-Najm ayat 31, yang artinya:

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap napa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun di samping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara dalam kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh negara.

2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak

hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. (yofi 2003)

- Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW. bersabda: “tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad).
- Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Saw. bersabda: “orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”.
- Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.

3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, antara lain, di dalam ayat-ayat berikut:

- QS. al-Qashash ayat 77, yang artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- QS. al-Baqarah ayat 201, yang artinya:
*Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".*¹⁸

Dara ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah Swt. dalam ayat-ayat berikut:

- QS. al-Hasyr ayat 7:
Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk

Allah, untuk, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu. Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

- QS. al-Maa'uun ayat 1-3:
1. *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*
2. *Itulah orang yang menghardik anak yatim,*
3. *Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*
- al-Ma'arij ayat 24-25:
Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (al-Ma'rij ayat 24)
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (al-Ma'rij ayat 25)

Ayat-ayat di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.

5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 188, artinya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu

dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Selain itu Firman Allah dalam QS.al-Baqarah ayat 275 ,artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹⁹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila²⁰. keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²¹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam begara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan

sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Rasulullah Saw. bersabda, artinya:

“Barangsiapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku; karena akulah maula (pelindung) nya”.(al-Mustadrak oleh Al-Hakim).

“siapa yang meninggalkan keturunan (yang tersisa-sia), anak (dia datang) kepada-Ku dan (menjadi) tanggung jawab-Ku”.(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

7. Bimbingan Konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam QS.al-A'raaf (7) ayat 31, artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,²² makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.²³ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

8. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-Mawsu'ah Al ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* memandang ada lima menilai kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a) Proyek yang baik menurut Islam.
- b) Memberikan resekai seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kelayakan.
- d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

e. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai - nilai dasar ekonomi islam terdiri dari:

1. Nilai dasar kepemilikan
2. Nilai dasar keadilan
3. Nilai dasar keseimbangan
4. Nilai dasar kebebasan
5. Nilai kebersamaan

a. Nilai Dasar Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalisme-kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya”.

Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme adalah konsep bersifat absolut.

Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak di perkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Terus bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam?

Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt.

Surah Al-Baqaroh ayat 107:

أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Terjemahnya:

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya.

Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

Di dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat (51) ayat 19:

وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin. (Adz-Dzaariyat (51):19).

Dalam hak yang membuat/ membentuk kepemilikan tersebut terbagi tiga:

1. Hak Allah Swt.
2. Hak jamaah.
3. Hak pribadi atau individu.

Dari ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, di mana dalam pengeluaran zakat maka seseorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang

bukan haknya. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki, tetapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menghambur-hamburkannya.

b. Nilai Dasar Keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (al-hikmah), keberanian (al-siyasyah), dan keterpeliharaan (aliffah). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamampuan serta bawaan yang sama.

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda - benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum.

Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada.

Bagaimana konsep keadilan dalam islam? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental.

Firman Allah dalam QS. an-nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.

c. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah, ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (*gap*), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

d. Nilai Dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Di dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

e. Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan. dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran "Adam Smith" yang menyatakan : "terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan public."

Dalam sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang

perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah perinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

f. Etika Islam Dalam Praktek Bisnis

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran faham kapitalis dan sosialis, maka Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif, dengan menanamkan prinsip tauhid dan menghadirkan nilai- nilai efika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syari'at (*maqashidal-syari'ah*) yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*),

keturunan (*posterity*) dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.²⁴

Basis utama sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan Syari'at, tetapi juga pada aspek tujuannya yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan dan keseimbangan.⁶ Atas dasar itu, maka pemberdayaan ekonomi syari'ah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini terutama di lapisan masyarakat bawah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.

Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain: Prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*).

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis sebagai berikut:

1. menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits Nabi menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
2. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
3. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi; ” apabila engkau berjual beli, katakanlah: tidak ada tipuan”.
4. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. Dalam hal ini Rasul memperingatkan: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan”. (HR Bukhari).
5. Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang”. (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang mempiutang orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya.” Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita”. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya ” (H.R. Bukhari).
6. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: “Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”.
7. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam.

Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilap : "Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaitnana telah diajarkan oleh Allah kepadanya".

8. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman: "Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa".
9. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.

III. PENUTUP

Ilmu ekonomi kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis, memisahkan diri dari filsafat etika dan kepentingan dari nilai-nilai moral. Azas ekonomi kapitalis didasarkan pada *laissez faire* (bebas, liberal), sedangkan azas ekonomi sosialis didasarkan pada konsep pertentangan kelas. Arus kehidupan yang terbentuk akibat dari sistem ekonomi di atas, telah mengikis nilai-nilai gotong royong, musyawarah, tolong-menolong dan kebersamaan dalam bingkai religius, sehingga mengakibatkan lahirnya kemiskinan di tengah kemakmuran yang kondisi ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, bahkan sangat menyimpang dari garis panduan Islam.

Salah satu tujuan *dinul Islam* adalah untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang berakhlak, egalitarian dan adil. Tujuan tersebut mencukup bagi semua aktivitas sosial juga tidak terkecuali dalam badan ekonomi. Dengan demikian, dirumuskanlah tujuan ekonomi Islam yaitu "untuk membangun sebuah tatanan ekonomi negara yang berakhlak mulia berazaskan

persamaan dan keadilan untuk melahirkan masyarakat yang madani di bawah lindungan Allah

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Disebut *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia

Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).

Nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan.

Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syaria'ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*).

Catatan Akhir:

¹ Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Ed.1. Cet. 3; Jakarta : Kencana 2010). h.5.

² Taqiyuddin An-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. (Cet.1 ;Bogor: Al-Azhar Press 2009), h. 10.

³Veithzal Rivai. *Islam economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Jakarta:2009, h. 20.

⁴*Ibid.*

⁵M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta;1997

⁶Ibid.

⁷M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*,. SEBI Institute, Jakarta;2001.

⁸Budi Setyanto. *Ekonomi Islam: Predana Media Group*, Jakarta;2010.

⁹Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h.3-7

¹⁰Ibid, h.7.

¹¹QS.al-Maa'idah ayat 3.

¹²Budi Setyanto, *op. Cit.*, h.11.

¹³Yusuf Qardhawi. *Nilai dan Peran Moral Dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta,1997.

¹⁴Umer Chapra, *op. Cit*

¹⁵Mustafa Edwin Nasution. *Op.Cit.h.13*.

¹⁶Ibid.h. 18-29.

¹⁷Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyaratkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

¹⁸Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim.

¹⁹Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah pembayaran lebih

²⁰Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan.

²¹Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

²²Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling ka'bah atau ibadah-ibadah yang lain.

²³Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

²⁴Umer Chapra. *Sistem Moneter Isla*, terjemahan dari *Toward Just Monetary System*, diterjemahkan Abidin basri, Gema Insani Press, Jakarta,2000.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an (QS.al-Maa'idah ayat 3).

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. (Cet.1 ;Bogor: Al-Azhar Press 2009), h. 1

Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*, terjemahan dari *Toward Just Monetary System*, diterjemahkan Abidin basri, Gema Insani Press, Jakarta,2000.

Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*,. SEBI Institute, Jakarta;2001.

Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Ed.1. Cet. 3; Jakarta : Kencana 2010). h.5

Rivai, Veithzal. *Islam economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Jakarta:2009, h. 20.

Setyanto, Budi. *Ekonomi Islam: Predana Media Group*, Jakarta;2010.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta;1997